

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA POLITEKNIK PELAYARAN
MALAHAYATI ACEH BESAR TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**MERIANI
NPM : 2002110009**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0851) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 15 Januari 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MERIANI
NPM : 2002110009

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA POLITEKNIK PELAYARAN
MALAHAYATI ACEH BESAR TAHUN 2020-2022**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19741019 200405 1 001

Pembimbing I

Eva Susanti, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II

Budi Safarul Anam, S.E., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001



Mengetahui,
Kepala Fakultas Ekonomi

Prof. Tarmizi Gudeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 15 Januari 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MERIANI

NPM : 2002110009

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA POLITEKNIK PELAYARAN
MALAHAYATI ACEH BESAR TAHUN 2020-2022**

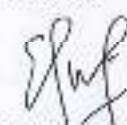
Yang telah dipertabankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 10 Januari 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

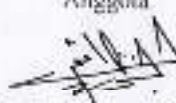
Ketua


Drs. Tarmizi Gudang, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


Evi Susanti, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

Anggota


Ermau M.J., S.E., M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Mengetahui

Program Studi Akuntansi




Ir. Zulkarnaen, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 15 Januari 2024

Yang Menyatakan




Meriani

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meriani
NPM : 2002110009
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR TAHUN 2020-2022

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalti Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencetak, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Meriani

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar Tahun 2020-2022”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak. CA selaku pembimbing pertama penulis

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh penulis.

5. Bapak Budi Safatul Anam, SE, M.Si. selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Pengertian Kinerja	8
2.1.2 Pengertian Anggaran	10
2.1.3 Kinerja Keuangan	13
2.1.4 Pengelolaan Keuangan	17
2.1.5 Efektivitas.....	20
2.1.6 Efisiensi	22
2.2 Penelitian Sebelumnya	24
2.3 Kerangka Pemikiran	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	31
3.1.1. Lokasi dan Objek Penelitian	31
3.1.2. Jenis Penelitian.....	31
3.1.3. Tingkat Intervensi Peneliti	32
3.1.4. Horizon Waktu	32
3.1.5. Unit Analisis.....	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.3 Teknik Analisis Data	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.1.1 Profil Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar	37
4.1.2 Visi dan Misi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar	38
4.1.3 Struktur Organisasi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar.....	39
4.2. Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Efisiensi Anggaran Belanja Politeknik Pelayaran	

Malahayati Aceh Besar.....	40
4.2.2 Efektifitas Anggaran Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar.....	42
4.3. Pembahasan	44
4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Efesiensi Realisasi Penerimaan PAD Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar.....	44
4.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari Tahun 2020-2022	4
Tabel 2.1	Kriteria Efisiensi	21
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efektivitas.....	23
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya.....	26
Tabel 3.1	Kategori Kemampuan Efisiensi Keuangan	35
Tabel 3.2	Kriteria Rasio Efektivitas.....	36
Tabel 4.1	Penerimaan dan Realisasi Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 s/d 2022	41
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 s/d 2022	43
Tabel 4.3	Penerimaan Pendapatan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 s/d 2022	44
Tabel 4.4	Realisasi Anggaran Anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar Daya dari tahun 2020 s/d 2022	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	29
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi	55
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022	56

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA POLITEKNIK PELAYARAN
MALAHAYATI ACEH BESAR TAHUN 2020-2022**

**MERIANI
NPM : 2002110009**

Pembimbing I : Eva Susanti, SE, M.Si, Ak. CA

Pembimbing II : Budi Safatul Anam, SE, M.Si.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020-2022. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada mengetahui efisiensi dan efektivitas belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja dan penerimaan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 dapat dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase anggaran belanja rutin dan penerimaan berada pada angka di atas 100%. Realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100%

Kata Kunci: *Belanja Anggaran, Efektivitas dan Efisiensi*

*ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AT THE MALAHAYATI ACEH
BIG SAILING POLYTECHNIC IN 2020-2022*

MERIANI
NPM: 2002110009

Supervisor I : Eva Susanti, SE, M.Si, Ak. C.A

Supervisor II : Budi Safatul Anam, SE, M.Si.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze and determine the financial performance of the Malahayati Aceh Besar Shipping Polytechnic in 2020-2022. The analysis model used is the descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field which is focused on determining the efficiency and effectiveness of shopping at the Malahayati Aceh Besar Shipping Polytechnic in 2020-2022. The research results show that the realization of the expenditure and revenue budget at the Malahayati Aceh Besar Shipping Polytechnic from 2020, 2021 and 2022 can be said to be inefficient because the percentage level of the routine expenditure budget and revenues is above 100%. The realization of the expenditure budget and expenditure budget targets at the Malahayati Aceh Besar Shipping Polytechnic for 2020, 2021 and 2022 can be said to be effective because the percentage level of the expenditure budget and realization of the expenditure budget is at 90-100%

Keywords: Budget Expenditure, Effectiveness and Efficiency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pelayaran pada jenjang pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profil Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh tidak terlepas dari semangat Kebaharian Masyarakat Aceh sebagaimana tergambar dalam riwayat pejuang wanita Aceh “Laksamana Malahayati” dan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar berdiri pada tahun 2010, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pelayaran yang kompeten, professional dan beretika serta memiliki daya saing global, pemerintah provinsi Aceh memberikan sebidang lahan seluas 25 Ha yang terletak di Gampong Durung, Kecamatan Masjid Raya, Jalan Laksamana Malahayati, Kabupaten Aceh Besar untuk dibangun Kampus Diklat Pelayaran

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu lembaga wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa

lembaga membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi lembaga dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh suatu instansi/lembaga dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu, dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Kinerja keuangan organisasi di suatu daerah adalah suatu kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan, kinerja keuangan juga merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan di bidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-

undangan yang diukur selama periode anggaran, di mana pengukurannya dalam penelitian mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend atau tendensi dan analisis rasio serta pengukurannya dilakukan dengan menilai dari kinerja keuangan APBN.

Analisis kinerja keuangan belanja daerah penting dilakukan dalam mengevaluasi kinerja keuangan organisasi yaitu apakah organisasi telah menggunakan APBN-nya secara ekonomis, efisien, dan efektif dan apakah organisasi dalam penganggarannya telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja keuangan belanja daerah bisa dikatakan baik apabila realisasinya lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam belanja daerah diperlukannya analisis keserasian belanja karena terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Kinerja organisasi seharusnya mendapatkan perhatian lebih, karna bukan hanya Pemerintah Pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja organisasi harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa organisasi berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (UU No.23 Tahun 2014).

Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Masyarakat seharusnya kritis dan sudah selayaknya melakukan pengukuran kinerja organisasi

untuk menilai akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara untuk menunjukkan akuntabilitas, maksudnya adalah bagaimana cara organisasi memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah tersusun anggaran.

Rasio efektivitas merupakan kemampuan organisasi dalam mengumpulkan pendapatan sesuai dengan jumlah penerimaan pendapatan yang telah ditargetkan. Dapat dianggap baik apabila rasio ini minimal mencapai hasil angka satu atau 100 persen.

Rasio efisiensi adalah pencapaian *output* yang *maximum* dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*, yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Untuk dapat menghitung rasio ini diperlukan data tentang berbagai biaya dari sumber pendapatan yang telah didapatkan. Kinerja keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dalam melakukan berbagai aktivitas sebagai pemasukan atau pendapatan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang telah dicapai kurang dari sepuluh persen.

Berdasarkan pengamatan awal pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di antaranya dari keterlambatan dalam pengajuan anggaran seperti kesulitan dalam menggabungkan dokumen pengajuan anggaran dari unit-unit kerja. Hal ini menyebabkan “kerja ekstra” bagi bagian perencanaan kantor pusat untuk menerjemahkan kemudian menggabungkan pengajuan anggaran unit kerja satu dengan lainnya. Belum lagi karena unit kerja terlambat mengumpulkan

dokumen ajuan anggaran, kantor pusat pun tidak bisa melihat sudah sejauh mana sebuah unit kerja dalam menyusun pengajuan anggarannya. Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu proses pengajuan anggaran tidak lepas dari yang namanya “Persetujuan” oleh pimpinan. Review anggaran dari pimpinan sangat penting untuk memastikan para pengguna anggaran tidak mengusulkan anggaran yang tidak sewajarnya. Namun dalam proses review atau peninjauan ulang oleh pimpinan ini pun tak lepas dari kendala. Kendala yang paling sering dihadapi oleh para pengguna anggaran adalah ketika dibenturkan pada tingginya mobilitas pimpinan. Hal tersebut sering kali menyebabkan terlambatnya proses review yang nantinya akan merembet pada terlambatnya pengajuan anggaran. Untuk mengetahui tingkat penggunaan anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Politeknik
Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)
2020	49.179.820.000	40.867.745.912	8.312.074.088	83,10%
2021	26.380.782.000	21.518.016.473	4.862.765.527	81,57%
2022	59.375.334.000	38.929.036.581	20.446.297.419	65,56%

Sumber: Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan terdapat beberapa fenomena atau permasalahan yang terjadi yaitu jumlah anggaran belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dan peningkatan, pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 49.179.820.000, pada tahun 2021 jumlah anggaran belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 26.380.782.000 dan pada tahun 2022 jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 59.375.334.000. Sisa

anggaran pada setiap tahun termasuk besar karena mencapai miliaran. Sisa anggaran dan tingkat persentase penggunaan anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuasi) yaitu sisa anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 8.312.074.088 dengan tingkat persentase 83,10%, sisa anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 4.862.765.527 dengan tingkat persentase 81,57%, dan sisa anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar pada tahun 2022 sebesar Rp 20.446.297.419 dengan tingkat persentase 65,56%. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Kinerja Keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah, “Bagaimanakah Kinerja Keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020-2022 yang ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020-2022 yang ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar.
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi kementrian dan Lembaga Pendidikan khususnya kinerja keuangan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai kinerja keuangan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020-2022 dengan rasio yang digunakan yaitu rasio efektivitas dan efisiensi.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Kinerja

Menurut Syahrani (2019:3) menyatakan bahwa “istilah kinerja (*performance*) identik dengan prestasi kerja, yang artinya sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dengan jelas *output* yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, baik segi kualitas maupun kuantitasnya”. Kinerja pegawai akan menunjuk pada efektivitas kerja pegawai, di mana hal ini akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan. Menurut Mangkunegara (2018:67) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Irawan (2019:4) menyatakan bahwa “kinerja merupakan perwujudan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi”. Oleh karena itu kinerja merupakan sasaran penentu dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi hal ini tidak mudah dicapai, karena banyak faktor yang mempengaruhi

tinggi rendahnya kinerja seseorang. Menurut Sedarmayanti (2020:2019) pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan pelaksanaan kegiatan, program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan dalam misi dan visi organisasi.

Menurut Hasibuan (2018:93) menyatakan bahwa “Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Pengukuran kinerja adalah merupakan suatu alat manajemen untuk bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”. Mengenai penilaian kinerja, menurut Simamora adalah proses yang mengukur karyawan, penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari kinerja pelaksanaan pekerjaan”. Menurut Widiaswari (2020:3) menyatakan bahwa “kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi”. Menurut Kurniati *et al.*, (2020:7) menyatakan bahwa “kinerja karyawan merupakan suatu perbandingan hasil kerja yang berkualitas dengan standart yang telah ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Menurut Winardi (2019:136) menyatakan bahwa “seorang manajer yang bekerja ekstra lama dikantornya guna memenuhi kebutuhannya yang akan prestasi, mungkin merasa jam-jam kerja ekstra tersebut berbenturan dengan kebutuhaannya akan diafiliasi yang diekspresi dalam wujud keinginannya untuk

berada ditengah-tengah keluarga”. Kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah.

Pentingnya kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparatur negara diantaranya yaitu (Raditya, 2019:2):

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang keaparaturan,
2. Melakukan penyempurnaan formasi aparatur,
3. Melakukan pengadaan, Pengangkatan, dan Penyelesaian Kepangkatan Aparatur Negeri,
4. Melakukan perbaikan penghasilan aparatur,
5. Meningkatkan disiplin aparatur,
6. Melakukan komputerisasi dan penyempurnaan tata kelola keaparaturan,
7. Meningkatkan kemampuan manajemen dan keterampilan serta produktivitas kerja aparatur negeri,
8. Mengadakan berbagai macam pendidikan dan pelatihan keaparaturan,
9. Menjaga kesehatan aparatur dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya,
10. Penyempurnaan administrasi

2.1.2 Pengertian Anggaran

Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2019:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.

Menurut Widiawari (2020:4) menyatakan bahwa “untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal. Rencana-rencana tersebut disusun secara baik yang nantinya bakalan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara”. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara atau daerah perlu dibuat penyusunan dan dituangkan dalam bentuk anggaran. Menurut Anthony dan Govindarajan (2019:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Bastian (2018:25) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang. Menurut Prawironegoro (2019:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”.

Mardiasmo (2018:61) menjelaskan bahwa “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Ayuningtyas (2019:70)

menjelaskan bahwa dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana financial yang menyatakan hal- hal :

- a. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan;
- b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut;
- c. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Menurut Rudianto (2020:66-67) fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Alat perencanaan
Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggaran memberikan sasaran, target, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi selama suatu periode waktu tertentu. Fungsi perencanaan anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu:
 - a. Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi.
 - b. Menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada tujuan umum, yaitu pencapaian laba usaha.
 - c. Memaksa seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 - d. Mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan.
 - e. Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi.
2. Alat pengendalian
Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Sebagai standar, anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam fungsi pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu:
 - a. Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi.
 - b. Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek organisasi
 - c. Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Menurut Halim (2019;20) APBK adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRK) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran. Menurut Wibowo (2019:102) terdapat 7 indikator kinerja:

1. Tujuan
Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Standar
Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama atasan atau bawahan.
3. Umpan Balik
Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
4. Alat atau Sarana
Alat atau sarana merupakan factor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.
5. Kompetensi
Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Motif
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.
7. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang organisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan organisasi, di mana satu pihak menggambarkan pemikiran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. APBK adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu anggaran termasuk APBK, memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Halim, 2019:22):

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktifitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP No. 58 Tahun 2005), tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan organisasi yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya sebagai bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka APBK.

Keuangan menurut Mamesah (Halim, 2019:23) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai

oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Akuntansi Keuangan (SAKD) secara umum adalah sebuah sistem informasi yang proses pencatatan serta pelaporan anggaran dan keuangan. Dengan adanya SAKD waktu untuk proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, kini penyusunan akan menjadi lebih cepat dan tidak ada lagi dokumen yang menumpuk banyak, hal ini terkait dengan adanya bantuan dari otomatisasi dan system digital.

Menurut Heriyanto (2020:2) sistem akuntansi adalah “organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan”. Berdasarkan definisi diatas, maka diketahui bahwa sistem akuntansi terdiri dari elemen-elemen pokok yaitu formulir, catatan serta laporan. Menurut Warongan (2019:3) “akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan merupakan terminology lama, pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, di mana akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi - transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupu tingkat daerah”.

Menurut Pernandes (2019:4) Akuntansi Keuangan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas organisasi (kabupaten, kota, atau propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-

pihak eksternal entitas organisasi (kabupaten, kota, atau propinsi) yang memerlukan.” Menurut Rasdianto (2020:6) “Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN).”

Menurut Kurnia (2020:6) Sistem Akuntansi Organisasi adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Organisasi.” Unsur-unsur sistem pengendalian intern harus dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang. Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun organisasi.

Menurut Ihsanti (2018:6) sistem akuntansi keuangan sebagai berikut: “suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung

jawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi organisasi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Menurut Nurillah (2018:45) sistem akuntansi keuangan adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan

Menurut Ruspina (2020:3) pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Keberhasilan pengelolaan keuangan mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi/SKPD dapat terlihat. Menurut Ruspina (2020:3)

pengelolaan keuangan dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Kasmir (2018:89) menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan sangat penting dalam setiap perusahaan, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar aktivitas perusahaan. Pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut: Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban”. Menurut Kasmir (2019:66) maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi keuangan perusahaan terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).

Menurut Ruspina (2020:3) APBN merupakan dasar pengelolaan anggaran dalam satu tahun anggaran. Pemungutan semua penerimaan bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN. Demikian pula semua pengeluaran dan ikatan yang membebani dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBN. Karena APBN merupakan dasar pengelolaan anggaran, maka APBN menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan. Tahun anggaran mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang

bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Menurut Nurillah (2018:45) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menyusun dan menyajikan laporan keuangan atas pelaksanaan APBN. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan kementerian yang dihasilkan negara terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan. Kewajiban penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran, menteri/pimpinan, lembaga selaku pengguna anggaran, sampai dengan presiden selaku kepala pemerintah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 menjelaskan bahwa “Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berupa laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan”. APBN sebagai sumber dana investasi berasal dari tabungan (*saving*). Sumber dana investasi swasta (perusahaan) berasal dari tabungan masyarakat yang terhimpun pada lembaga keuangan bank. Adapun sumber dana investasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah dalam hal ini terbentuk dari sisa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2.1.5 Efisiensi

Menurut Murni (2019:6) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maximum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Menurut Trianto (2020:5) Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*.

Menurut Yuniarti (2019:3) Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk. Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah rasio antara penerimaan dengan belanja rutin, di mana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Mardiasmo (2018:133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output*

di banding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian anggar Kinerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi

No	Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
1	Diatas 100%	Tidak Efisien
2	90-100%	Kurang Efisien
3	80-90%	Cukup Efisien
4	60-80%	Efisien
5	Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2019:187)

2.1.6 Efektivitas

Menurut Murni, (2019:6) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengertian Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam, tergantung dari pada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan. Menurut Trianto (2020:5) Efektivitas pengelolaan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli dengan target yang ditetapkan dalam APBN.

Menurut Robbins (2020:8) Efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran.

Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Menurut Siagian (2019:24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Menurut Ahadi (2019:3). Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut.

Menurut pendapat Azlin (2020:18) mengatakan beberapa ukuran dari efektifitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan tujuan tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan

11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbakuan terhadap rangsangan lingkungan.

Menurut Mardiasmo (2018:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektivitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus efektivitas menurut Mahsun (2019:187) adalah sebagai berikut:.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Kriteria Rasio Efektivitas

No	Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
1	> 100	Sangat Efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2019:187

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Ernitati (2016) dengan judul Analisis Kinerja Universitas Berstatus Badan Layanan Umum (BLU) (Studi Kasus Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kinerja UIN Sultan Syarif

Kasim Riau. Sedangkan kinerja Universitas sudah memenuhi apa yang ada diharapkan dalam Rencana Strategi Bisnis 2008-2012. Dari perspektif pemangku kepentingan. Perspektif pendidikan & pembelajaran, sumber daya manusia dan budaya kerja yang dimiliki tidak mencapai target yang sudah didapat. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa dari Perspektif Keuangan dan Administrasi Kinerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian dari Saputra dan Ijma (2019) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Perampangan Struktur Pengelola Pada STIE Mujahidin Tolitoli. Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kondisi kinerja keuangan STIE Mujahidin Tolitoli ditinjau dari aspek Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas setelah perampangan struktur pengelola mengalami peningkatan nilai yang dapat diartikan bahwa kinerja keuangan setelah perampangan struktur pengelola lebih baik dari sebelumnya karena nilai tersebut terus meningkat dan berada diatas standar rata-rata industri.

Penelitian dari Gumelar (2019) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Sekolah Menggunakan Metode *Value For Money* (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Mojogedang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan SMP Negeri 1 Mojogedang pada tahun 2016 menunjukkan kinerja keuangan ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan SMP Negeri 1 Mojogedang pada tahun 2017 menunjukkan kinerja ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan SMP Negeri 1 Mojogedang pada tahun 2018 menunjukkan kinerja ekonomis, efisien, dan tidak efektif.

Syahromi (2020) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Padang. Dari hasil perhitungan rasio keuangan, dapat dilihat bahwa kinerja Universitas Negeri Padang setelah diterapkannya PK BLU ini semakin membaik dari tahun ketahunnya meski dari sisi rasionya masih belum stabil sedangkan untuk Tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa) setelah diterapkannya PK BLU di Universitas Negeri Padang, dengan menggunakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70,02. Nilai tersebut masuk kedalam kategori baik.

Lolu et al. (2023) dengan judul Penilaian Kinerja Keuangan Perguruan Tinggi Menggunakan Analisis Rasio Keuangan dan Konsep EVA (Economic Value Added) (Studi pada Universitas Nusa Lontar Rote Periode 2019- 2021). Hasil penelitian menyatakan bahwa rasio keuangan Universitas Nusa Lontar Rote mampu mengelola aktiva dan modal untuk meningkatkan penjualan dan laba menjadi lebih baik untuk membiayai kewajiban utang. Kinerja keuangan Universitas Nusa Lontar Rote, periode 2019-2021 diukur dari perhitungan EVA ini mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dalam tiga tahun periode penelitian. Nilai EVA yang semakin tinggi akan menarik investor, karena semakin besar nilai EVA maka semakin tinggi nilai lembaga tersebut yang berarti semakin besar keuntungan yang dinikmati.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	----------------	------------------	-----------	-----------

	Penelitian			
1	Analisis Kinerja Universitas Berstatus Badan Layanan Umum (BLU) (Studi Kasus Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau) (Ernitati, 2016)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kinerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sedangkan kinerja Universitas sudah memenuhi apa yang ada diharapkan dalam Rencana Strategi Bisnis 2008-2012. Dari perspektif pemangku kepentingan. Perspektif pendidikan & pembelajaran, sumber daya manusia dan budaya kerja yang dimiliki tidak mencapai target yang sudah didapat. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa dari Perspektif Keuangan dan Administrasi Kinerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau.	Kinerja keuangan sama-sama menggunakan pengukuran dari efisiensi dan efektifitas	Lokasi penelitian dan waktu penelitian, kemudian penelitian ini menggunakan kinerja Balanced Scorecard, yang menganalisis pada perspektif keuangan dan non keuangan
2	Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Perampingan Struktur Pengelola Pada STIE Mujahidin Tolitoli. (Saputra dan Ijma, 2019)	Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kondisi kinerja keuangan STIE Mujahidin Tolitoli ditinjau dari aspek Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas setelah perampingan struktur pengelola mengalami peningkatan nilai yang dapat diartikan bahwa kinerja keuangan setelah perampingan struktur pengelola lebih baik dari sebelumnya karena nilai tersebut terus meningkat dan berada diatas standar rata-rata industri.	Pengukuran anggaran dengan rasio efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan waktu penelitian, rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas
3	Analisis Kinerja Keuangan Sekolah Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Mojogedang (Gumelar, 2019)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan SMP Negeri 1 Mojogedang pada tahun 2016 menunjukkan kinerja keuangan ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan SMP Negeri 1 Mojogedang pada tahun 2017 menunjukkan kinerja ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan SMP Negeri 1 Mojogedang pada tahun 2018 menunjukkan kinerja ekonomis, efisien, dan tidak efektif.	Kinerja keuangan sama-sama menggunakan pengukuran dari efisiensi dan efektifitas	Lokasi penelitian dan waktu penelitian, pengukuran rasio ekonomis

Lanjutan Tabel 2.3

No	Judul dan Nama Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan	Dari hasil perhitungan rasio keuangan, dapat dilihat bahwa kinerja Universitas Negeri Padang setelah diterapkannya PK BLU ini	Kinerja keuangan sama-sama menggunakan	Penelitian ini pengukuran indeks

	Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Padang (Syahromi, 2020)	semakin membaik dari tahun ketahunnya meski dari sisi rasionya masih belum stabil sedangkan untuk Tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa) setelah diterapkannya PK BLU di Universitas Negeri Padang, dengan menggunakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70,02. Nilai tersebut masuk kedalam kategori baik.	kan pengukuran dari efisiensi dan efektifitas	kepuasan masyarakat. Lokasi penelitian dan waktu penelitian
5	Penilaian Kinerja Keuangan Perguruan Tinggi Menggunakan Analisis Rasio Keuangan dan Konsep EVA (Economic Value Added) (Studi pada Universitas Nusa Lontar Rote Periode 2019- 2021) (Lolu, 2023)	Hasil penelitian menyatakan bahwa rasio keuangan Universitas Nusa Lontar Rote mampu mengelola aktiva dan modal untuk meningkatkan penjualan dan laba menjadi lebih baik untuk membiayai kewajiban utang. Kinerja keuangan Universitas Nusa Lontar Rote, periode 2019-2021 diukur dari perhitungan EVA ini mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dalam tiga tahun periode penelitian. Nilai EVA yang semakin tinggi akan menarik investor, karena semakin besar nilai EVA maka semakin tinggi nilai lembaga tersebut yang berarti semakin besar keuntungan yang dinikmati.	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan, namun terdapat perbedaan pengukurannya	Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Pengukuran menggunakan rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio leverage.

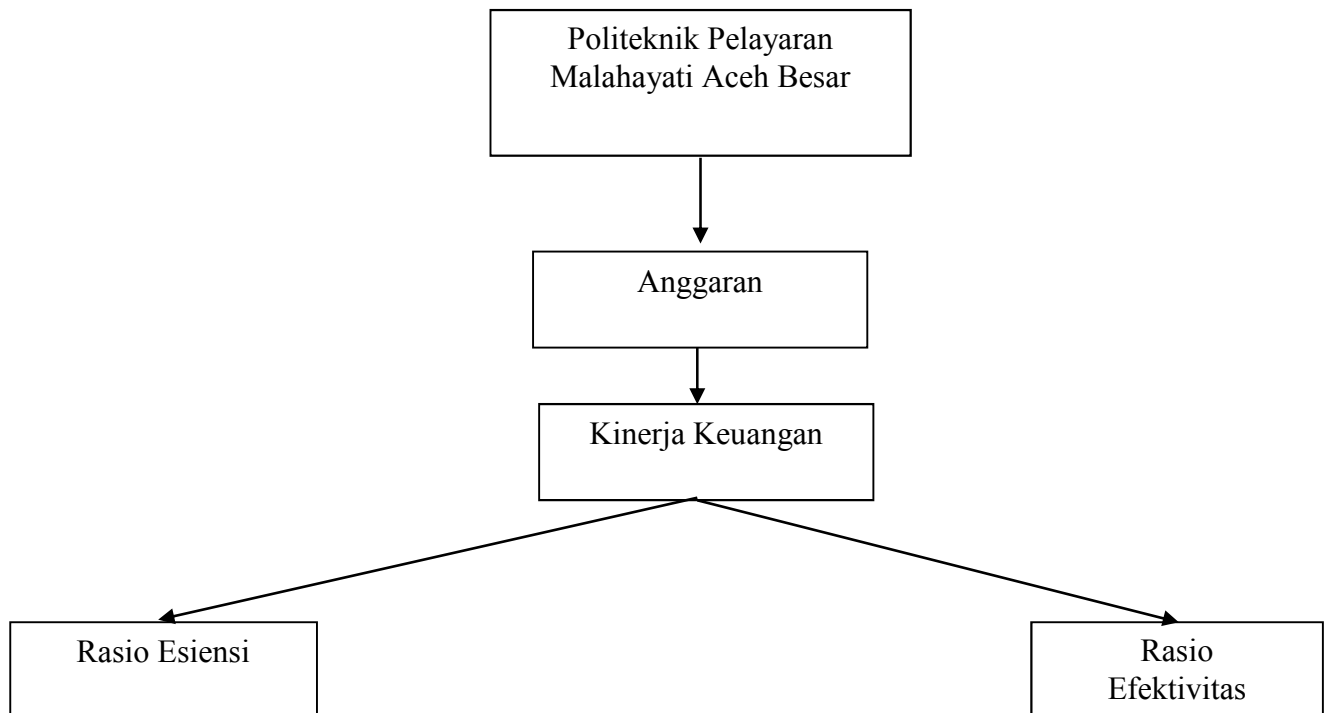
2.3 Kerangka Pemikiran

Anggaran sektor publik pemerintah dapat dilihat dari kondisi keuangan suatu kinerja aparat. Pada sisi pendapatan, dengan pendapatan yang didapatkan dengan total pendapatan dapat dilihat tingkat kemandirian suatu instansi, di mana semakin tinggi nilainya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecendrungan pola belanja, apakah suatu instansi cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya

peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Adanya kewenangan yang lebih luas yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak hanya diindikasikan mempengaruhi pendapatan, tetapi mempengaruhi pola/stuktur belanja. Perubahan pola belanja, terutama dengan peningkatan belanja pembangunan menjadi hal yang logis dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan. Terkait dengan hal itu, pemerintah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah juga semakin tinggi. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut;

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Dalam konteks kinerja keuangan, efisiensi dan efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran belanja telah digunakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas, dapat diidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Efisiensi dan efektivitas adalah dua faktor penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Efisiensi mengacu pada sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Ini melibatkan penggunaan yang optimal dari sumber daya yang tersedia, seperti anggaran belanja, untuk menghasilkan output yang maksimal. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Sementara itu, efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan keuangan yang ditetapkan telah

tercapai. Ini melibatkan pencapaian hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; lokasi dan objek penelitian, jenis penelitian, tingkat intervensi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar yang beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No.Km.19, RW.No.12, Durung, Kec. Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23381. Objek penelitian yang akan diteliti adalah kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar periode 2020-2022.

3.1.2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Umar (2020:142) penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi sekarang.

Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya pada

pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

3.1.3. Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal di mana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi adalah kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar periode 2020-2022.

3.1.4. Horison Waktu

Menurut Sugiyono (2018:6) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.5. Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah keuangan pada tahun 2020-2022

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut Sutopo (2018:56), "Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh". Menurut Sugiyono (2018:147) Data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku, teks maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu sebuah tulisan yang memuat informasi. Mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar seperti dokumen mengenai profil Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar, data laporan keuangan dan lainnya

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:15) penelitian kualitatif adalah "suatu metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dianalisa dan diolah, dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran.

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini dibandingkan dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka akan semakin baik kinerja organisasi (Mahsun, 2019:187). Dengan demikian efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar periode 2020-2022 dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kategori kemampuan efisiensi keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.3;

Tabel 3.1

Kategori Kemampuan Efisiensi Keuangan

Kemampuan keuangan	Rasio efisiensi (%)
Tidak efisiensi	>100
Kurang efisiensi	>.90-100
Cukup efektif	>80-90
Efisiensi	>60-80
Sangat efisiensi	≤ 60

Sumber: Mahsun (2019:187)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan yang diterapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau seratus persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Rumus efektivitas menurut Mahsun (2019:187) adalah sebagai berikut:.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kategori kemampuan efektivitas keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dapat dilihat padaa tabel 3.2;

Tabel 3.2
Kategori Kemampuan Efektivitas

Kemampuan keuangan	Rasio efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup efektif	>80-90
Kurang efektif	>60-80
Tidak efektif	≤60

Sumber: Mahsun (2019:187)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar beramat di Jl. Laksamana Malahayati Km.19 No.12 Gampong Durung Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh, 23381 info_bp2ipaceh@yahoo.co.id. Sejarah berdirinya BP2IP Malahayati Aceh tidak terlepas dari semangat Kebaharian Masyarakat Aceh sebagaimana tergambar dalam riwayat pejuang wanita Aceh “Laksamana Malahayati” dan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Selepas bencana Tsunami yang menghancurkan sebagian pesisir pantai barat dan utara Aceh pada tahun 2004, semangat untuk bangkit memulai kehidupan baru dengan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Aceh pada tahun 2010, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pelayaran yang kompeten, professional dan beretika serta memiliki daya saing global, pemerintah provinsi Aceh memberikan sebidang lahan seluas 25 Ha yang terletak di Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Jalan Laksamana Malahayati, Kabupaten Aceh Besar untuk dibangun Kampus Diklat Pelayaran (Rating School Aceh).

Kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan ilmu Pelayaran Malahayati Aceh berada di pantai utara pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan laut membentang luas pertemuan Selat Malaka dan Samudera Hindia. BP2IP Malahayati Aceh diresmikan pada tanggal 23 November 2012 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia EE Mangidaan dan dihadiri oleh Menteri

Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Gubernur Aceh Dr. Zaini beserta Masyarakat Aceh. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BP2IP Malahayati Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 85 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu pelayaran Malahayati Aceh Besar.

4.1.2 Visi dan Misi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai. Visi merupakan gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi atau organisasi di masa depan. Misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai / mewujudkan visi tersebut. Visi berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi masa depan. Visi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar adalah “Menjadi Politeknik Pelayaran yang Unggul pada Tahun 2024”

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan misi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar :

1. Menerapkan sistem pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan peningkatan kemampuan berbahasa inggris untuk Mewujudkan Lulusan yang prima, profesional, beretika, dan berdaya saing tinggi.

2. Melaksanakan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung pengembangan industri pelayaran.
3. Menerapkan sistem manajemen mutu dalam menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
4. Meningkatkan jejaring kerja dengan sektor industri pelayaran serta berbagai institusi terkait.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

4.1.3 Struktur Organisasi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Struktur organisasi adalah susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama. Pembuatan struktur ini ditujukan untuk membuat proses kerja tiap elemen organisasi menjadi lebih mudah, berjalan efektif, efisien, serta optimal. Tugas pokok Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pelayaran. Struktur organisasi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efisiensi Anggaran Belanja Pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Politeknik Pelayaran Malahayati

Aceh Besar digunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100$$

Perhitungan efisiensi realisasi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi realisasi pendapatan dan jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020

$$\text{Efisiensi 2020} = \frac{63.003.532.769}{22.135.786.857} \times 100 = 284,62\%$$

- b. Efisiensi realisasi pendapatan dan jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2021

$$\text{Efisiensi 2021} = \frac{54.101.695.342}{32.583.678.869} \times 100 = 166,04\%$$

c. Efisiensi realisasi pendapatan dan jumlah realisasi belanja pada Politeknik

Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2022

$$\text{Efisiensi 2022} = \frac{89.351.308.851}{50.422.727.270} \times 100 = 177,20\%$$

Dari perhitungan rumus efisiensi realisasi pendapatan dan jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Efisiensi Jumlah Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Politeknik
Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 s/d 2022

No	tahun	Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (RP)	Persentase	Kinerja Keuangan
1	2020	63.003.532.769	22.135.786.857	284,62%	Tidak efisien
2	2021	54.101.695.342	32.583.678.869	166,04%	Tidak efisien
3	2022	89.351.308.851	50.422.727.270	177,20%	Tidak efisien

Sumber : Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 63.003.532.769 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 22.135.786.857 dengan tingkat persentasi 284,62% artinya efisiensi pengelolaan kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020 dapat dikelola dengan tidak efisien. Pada tahun 2021 jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 54.101.695.342 dan pendapatan sebesar Rp 32.583.678.869 dengan tingkat persentasi 166,04% artinya efisiensi pengelolaan kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2021 dapat dikelola dengan tidak efisien. dan pada 2022 jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati

Aceh Besar sebesar Rp 89.351.308.851 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 50.422.727.270 dengan tingkat persentasi 177,20% artinya efisiensi pengelolaan kinerja keuangan pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2022 dapat dikelola dengan tidak efisien..

4.2.2 Efektifitas Anggaran Belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Untuk mengetahui efektifitas anggaran belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar digunakan rumus Mahsun (2020:187):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020

$$\text{Efektifitas 2020} = \frac{63.003.532.769}{64.265.515.000} \times 100 = 98,04\%$$

- b. Efektifitas anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2021

$$\text{Efektifitas 2021} = \frac{54.101.695.342}{54.937.869.000} \times 100 = 98,48\%$$

- c. Efektifitas anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2022

$$\text{Efektifitas 2022} = \frac{89.351.308.851}{89.355.334.000} \times 100 = 99,99\%$$

Dari perhitungan rumus efektifitas realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel

4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2

**Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati
Aceh Besar dari tahun 2020 s/d 2022**

No	tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)	Kinerja Keuangan
	1	2	3	2-3	$(3:2) \times 100$	
1	2020	64.265.515.000	63.003.532.769	1.261.982.231	98,04%	Efektif
2	2021	54.937.869.000	54.101.695.342	836.173.658	98,48%	Efektif
3	2022	89.355.334.000	89.351.308.851	4.025.149	99,99%	Efektif

Sumber : Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 target anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 64.265.515.000 dan realisasi dari anggaran tersebut sebanyak Rp 63.003.532.769 dengan tingkat persentase 98,04% dari total anggaran. Pada tahun 2021 target anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebanyak Rp 54.937.869.000 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 54.101.695.342 dengan tingkat persentase 98,48% dari total anggaran dan tahun 2022 target anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar 89.355.334.000 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 89.351.308.851 dengan tingkat persentase sebanyak 99,99% dari total anggaran. Dapat disimpulkan bahwa realisasi Anggaran Belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 s/d 2022 dapat dikelola dengan efektif.

4.3 Pembahasan

4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi Jumlah belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Efisiensi realisasi pendapatan dan jumlah realisasi belanja anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan pada Politeknik Pelayaran
Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 s/d 2022

No	tahun	Jumlah Belanja (Rp)	Pendapatan (RP)	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2020	63.003.532.769	22.135.786.857	284,62%	Tidak efisien
2	2021	54.101.695.342	32.583.678.869	166,04%	Tidak efisien
3	2022	89.351.308.851	50.422.727.270	177,20%	Tidak efisien

Sumber : Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 sampai 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 63.003.532.769 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 22.135.786.857 dengan tingkat persentasi 284,62%. Artinya kemampuan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efesien karena tingkat persentase di atas 100%
2. Pada tahun 2021 jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 54.101.695.342 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 32.583.678.869 dengan tingkat persentasi 166,04%. Artinya kemampuan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efesien karena tingkat persentase di atas 100%
3. Pada 2022 jumlah realisasi belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 89.351.308.851 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 50.422.727.270 dengan tingkat persentasi 177,20%. Artinya kemampuan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efesien karena tingkat persentase di atas 100%.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat efisiensi penerimaan dan realisasi (tidak efisien) anggaran di antaranya selama pelaksanaan anggaran proses pengadaan barang dan jasa yang sering kali menjadi kendala hingga menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada lambatnya realisasi anggaran, sebenarnya proses pengadaan barang dan jasa sudah dapat dilakukan pada akhir tahun. Namun, seringkali terjadi perubahan, perbaikan, dan sebagainya yang membuat tanda tangan kontrak kegiatan tak bisa dilakukan di awal tahun. Selain itu pengelolaan anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas lapangan sehingga sistem pencatatan pelaporan yang dibangun dengan baik tidak dapat berjalan dengan *maximal*. Tingkat pengetahuan aparatur baik secara alur sistematis pencatatan dan pelaporan atau secara sistem pelaporan online masih rendah. Penguasaan teknologi informasi khususnya penguasaan dasar-dasar komputer oleh penyuluh masih rendah. Mekanisme pertanggung jawaban anggaran masih banyak dikeluhkan karena dirasakan terlalu rumit dan membutuhkan banyak biaya.

4.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Efektifitas anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi Anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dari tahun 2020 s/d 2022

No	tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan Keuangan
	1	2	3	2-3	$(3:2) \times 100$	

1	2020	64.265.515.000	63.003.532.769	1.261.982.231	98,04%	Efektif
2	2021	54.937.869.000	54.101.695.342	836.173.658	98,48%	Efektif
3	2022	89.355.334.000	89.351.308.851	4.025.149	99,99%	Efektif

Sumber : Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai realisasi anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020 sampai 2022 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 63.003.532.769 dari target anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 64.265.515.000 dengan tingkat persentase 98,04%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 1.261.982.231 yang tidak digunakan oleh Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2020 Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dapat dikatakan efektif.
2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 54.101.695.342 dari total target anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 54.937.869.000 dengan tingkat persentase 98,48%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 836.173.658 yang tidak digunakan oleh Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dapat dikatakan efektif.
3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 89.351.308.851 dari total target anggaran Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar sebesar Rp 89.355.334.000 dengan tingkat persentase 99,99%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 4.025.149 yang tidak digunakan oleh Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar. Dapat

disimpulkan realisasi anggaran tahun 2022 Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dapat dikatakan efektif.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat efektivitas anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar diantaranya peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah penstandaran biaya. Biaya dilapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang. Ketakutan menggunakan anggaran, yaitu adanya kehati-hatian dari pejabat perbendaharaan dalam melaksanakan pengadaan mengingat maraknya kasus tipikor yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ketakutan ini muncul karena banyaknya pejabat atau pelaksana anggaran diseret kemeja hijau karena terlibat tindak pidana korupsi. Dipengaruhi oleh rasa takut itu banyak yang enggan merealisasikan program kegiatan yang telah dianggarkan. Selain itu waktu penggunaan anggaran yang terlalu singkat juga dapat menurunkan tingkat efektivitas anggaran belanja seperti anggaran belanja yang diperuntukan untuk pembangunan atau lainnya, karena untuk suatu proses pembangunan membutuhkan waktu yang efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan berdasarkan jumlah realisasi belanja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020-2022 dapat dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase anggaran belanja rutin dan penerimaan berada pada angka di atas 100%.
2. Kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja pada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100% .

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan pembangunan dan pengelolaan anggaran dan belanja anggaran agar bisa lebih baik dari pada tahun sebelumnya.
2. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Besar dapat mengelolan realisasi anggaran belanja dengan efektif seperti mengelola anggaran yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan. Kemudian

pimpinan dapat memberikan tugas kepada aparatur yang sesuai dengan bidangnya sehingga aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti tentang efisien dan efektifitas anggaran belanja saja, tapi juga meneliti hal lainnya seperti penerapan akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian keuangan pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahadi, Nopri. (2019). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: UIR Press
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, (2019). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Ayuningtyas, Hertianti. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Azlin, N. (2020). Analisis Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau (Studi Kasus Ruang Rawat Inap Kelas III). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 1-17.
- Bastian, Indra. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Ernitati. (2016). Analisis Kinerja Universitas Berstatus Badan Layanan Umum (BLU) (Studi Kasus Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kinerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau. *Pekbis Jurnal*, 8 (1), 44-52
- Gumelar, R. F. (2019) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Sekolah Menggunakan Metode *Value For Money* (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Mojogedang). *Jurnal Universitas Sanata Dharma*.
- Halim, Abdul (2019). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2019). *Analisis Kritis atas Lapoan Keuangan*. Jakarta : Raja Grasindo Persada
- Hasibuan, Malayu S.P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta*
- Heriyanto. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.
- Ihsanti, E. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Vol. 1 Nomor. 2, Hal 1-7*.

- Irawan, Bambang (2019). Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Universitas Mulawarman Samarinda*
- Karani, Kanti. (2018). Evaluasi Keefektifan Penyerapan Anggaran (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta). *Tesis Akuntansi*
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Prenamedia
- Kurnia, I. (2020). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat)*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Kurniati., Yulia Dewi., & Roniwati (2020) Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara. *e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 2*
- Lolu, M., Manafe, H. A., dan Perseveranda, M. E. (2023). Penilaian Kinerja Keuangan Perguruan Tinggi Menggunakan Analisis Rasio Keuangan dan Konsep EVA (Economic Value Added) (Studi pada Universitas Nusa Lontar Rote Periode 2019- 2021). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4 (6), 839-845.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. A. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Murni, Sri (2019) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*.
- Nurillah, S. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan*

Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi. Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan *Laporan Keuangan*.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan*.

Prawironegoro, Darsono. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media

Raditya, Kadek. D. (2019). Analisis Kinerja Aparat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 3.10 (2019) :551-558

Robbins SP, dan Judge. (2020). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.

Rompas, W. (2020). Analisis Kinerja Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14, No. 2

Rudianto. (2020). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga

Ruspina, D. (2020). Pengaruh Kinerja aparatur pemerintah daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 1 (1), 1-13.

Saputra, A., dan Ijma. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Perampingan Struktur Pengelola Pada STIE Mujahidin Tolitoli. *Economy Deposit Journal*, 2 (1), 8-16.

Sedarmayanti. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sekaran, U. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Siagian, Sondang P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Indonesian Treasury Review Vol.3, No.1*
- Suparmoko. (2019). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Kedua*. Yogyakarta
- Susilo, Y Sri (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutopo, A. H. (2018). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada.
- Syahrani. (2019). Analisis Kinerja Aparatur Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Nunukan. *Journal Administrative Reform, 2019, 2 (3): 1624-1636*
- Syahromi, M. (2020) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No 2, Hal 2839-2
- Trianto, A. (2020) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*.
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Gramedia.
- Undang- Undang No.11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintah Aceh*.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang *Organisasi*.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Warongan, D. L. (2019). dengan Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

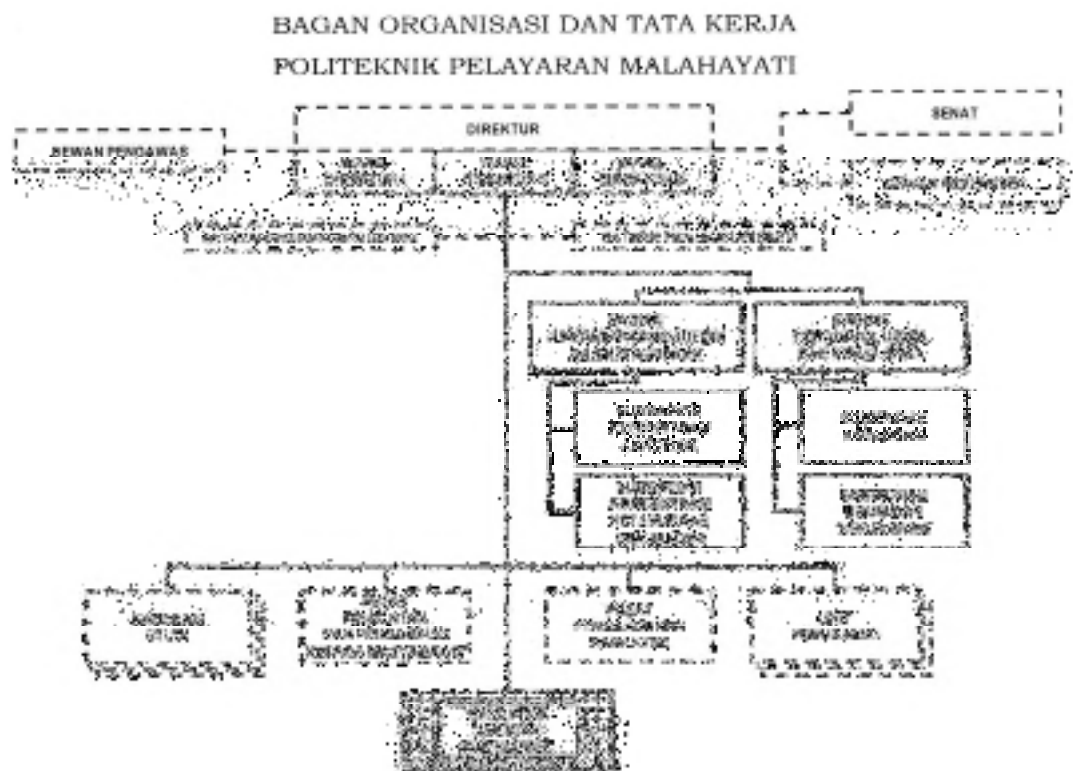
Tenggara. objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (SKPD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04*.

Wibowo. (2019). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Widiaswari, Roro Rukmini. (2020). Hubungan Antara Faktor Kemampuan Dengan Kinerja Pegawai Kecamatan Banjarbaru Kota. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 1 (3) 18 – 29*

Yunianti, Umi (2019) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBNesa). *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta. ISBN 978-602-73690-3-0*.

Lampiran 1. Struktur Organisasi



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aceh Besar, 31 Maret 2021

Direktur Politeknik Pelayaran

Malahayati

The image shows a circular official stamp of Politeknik Pelayaran Malahayati. The stamp contains the text "KEMENTERIAN PERKAPALAN", "POLITEKNIK PELAYARAN", and "MALAHAYATI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

JONI TURISKA, ST, M.Si, M.Mar.E
NIP. 19550602 199808 1 001

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKPEL MALAHAYATI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2020		% Terhadap Anggaran	TA 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan Jasa Layanan Umum		15.085.695.000	19.509.696.044	129,33%	16.519.505.001
Pendapatan BLU Lainnya		-	2.601.183.036	0,00%	1.994.481.009
Pendapatan PNPB Lainnya		-	24.907.777	0,00%	30.601.822
		15.085.695.000	22.135.786.857	146,37%	18.544.587.832
BELANJA					
Belanja Pegawai		7.193.980.000	6.908.385.975	96,03%	6.186.260.011
Belanja Barang		55.699.165.000	54.727.580.794	98,26%	73.486.262.393
Belanja Modal		1.372.370.000	1.367.566.000	99,65%	13.611.943.268
		64.265.515.000	63.003.532.769	98,04%	93.284.465.672
SURPLUS / DEFISIT		(49.179.820.000)	(40.867.745.912)	83,10%	(74.739.877.840)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA : 002
ESKELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0610
SATUAN KERJA : 449731
JENIS KEMENDANGAN : KP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
MANGROVE ACEH DANRUSSALWA
BP2IP NALAHAYATI ACEH
KANTOR PURAT

Tahun Laku : 2020
Tahun Ref : 2019
11/03/2021
Angg 001

No	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1	PENERIMAAN NEGARA								
A.1.1a	Penerimaan Pajak	15.066.086.000	22.135.756.85	1.050.091.807	145,73	23.678.300.000	18.544.567.850	5.100.012.189	78,65
A.1.1b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.085.656.000	22.135.756.85	1.000.051.547	140,71	25.678.300.000	18.544.567.850	5.000.012.156	78,65
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	15.086.656.000	22.135.756.85	1.050.081.807	146,73	23.678.300.000	18.544.567.850	5.000.012.156	78,65
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	64.208.515.000	65.823.512.755	1.267.062.201	98,04	102.402.611.000	302.264.490.672	8.105.146.325	91,02
B.1.1a	Belanja Pegawai	7.103.080.000	5.008.385.877	265.504.025	96,03	6.567.462.000	5.186.203.011	381.231.593	94,26
B.1.1b	Belanja Barang	55.850.105.000	64.757.500.754	917.554.206	96,25	92.298.686.000	175.400.282.280	8.772.236.627	99,30
B.1.1c	Belanja Modal	1.175.270.000	1.387.586.000	4.864.000	91,65	13.856.020.000	15.611.940.359	44.616.700	99,67
B.1.1d	Penyediaan Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.1e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.1f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.1g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.1h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2	Rekening dan Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2a	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2b	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2c	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2d	Penyediaan Bunga Jang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA	84.208.515.000	65.823.512.755	1.267.062.201	98,04	102.402.611.000	302.264.490.672	8.105.146.325	91,02
C	PENYAYARAN								
C.1	PENYAYARAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.1f	Pelayanan Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 SATUAN KERJA : 449731 BP2IP MALAHAYATI ACEH
 JENIS KEMENANGAN : KP KANTOR PUSA7

No	URAIAN	2020					2019		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI % ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.1.2	Non Pertahanan Dalam Negeri (Materi)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.4	PEMBAYARAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Pembelian Perjalanan Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Pembayaran Biaya Perjalanan Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

ACEH BESAR, 10 April 2021

KEPENGUNJANG PENGANTARA ANGGARAN

 NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 ST. M. BI, M. Mer. E
 NIP. 19450672 59608 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI**

Jl. Laksamana Malahayati Km. 19 No. 12
Gampong Durong Kec. Masjid Raya,
Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh 23381

☎ : (0651) 33803, 33806
☎ : (0651) 33909
📠 : 062196734976

✉ : info_bp2.peser@yahoo.co.id
📧 : poltekpelaseh @poltekpelaseh
🌐 : poltekpelaseh www.bp2.peser.ac.id

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN

**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H., M.Mar.
Alamat kantor : Jl. Laksamana Malahayati Km 19 No 12, Gampong Durong
Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar
Jabatan : Direktur Politeknik Pelayaran Malahayati

Untuk dan atas nama Politeknik Pelayaran Malahayati menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati;
2. Laporan keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Politeknik Pelayaran Malahayati.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Aceh Besar, 02 Maret 2022
Direktur Politeknik
Pelayaran Malahayati

Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H., M.Mar.
NIP. 197307041998031001

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKPEL MALAHAYATI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CALK	2021		%	2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah	B.1	28.557.087.000	32.583.678.869	114,10	22.135.786.857
Pendapatan		28.557.087.000	32.583.678.869	114,10	22.135.786.857
BELANJA Belanja Pegawai Belanja	B.2				
Barang Belanja Modal Jumlah Belanja	B.2.1	4.549.188.000	4.549.093.351	100,00	6.908.385.975
DEFISIT	B.2.2	50.114.681.000	49.279.383.453	98,33	54.727.580.794
	B.2.3	274.000.000	273.218.538	99,71	1.367.566.000
PEMBIAYAAN		54.937.869.000	54.101.695.342	98,48	63.003.532.769
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		(26.380.782.000)	(21.518.016.473)	81,57	(40.867.745.912)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri					
SISA KURANG PENGGUNAAN		-	-	-	-
ANGGARAN (SIKPA)		-	-	-	-
		(26.380.782.000)	(21.518.016.473)	81,57	(40.867.745.912)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

- 4 -



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI

Jl. Laksamana Malahayati Km. 19 No. 12
Gampong Duriang Kec. Masjid Raya,
Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh 23381

☎ : 0651-23300, 23306
☎ : 0651-23308
HOTLINE: 062-16724477

✉ info.tp2pelan@kemhub.go.id
☎ 0651-23300
☎ 0651-23308
www.tp2.pindia.id

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Capt. Dedy Kurniadi, M.M
Alamat kantor : Jl. Laksamana Malahayati Km 19 No. 12, Gampong Duriang
Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar
Alamat rumah sesuai KTP : Komplek Dosen STIP Blok S/20 RT 002/008 Marunda Kec.
Cilingjing Jakarta Utara
Jabatan : Direktur Politeknik Pelayaran Malahayati

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh.
2. Laporan Keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP)
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh telah dimuat secara lengkap dan benar
4. Laporan Keuangan Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
5. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Aceh Besar, 27 Maret 2023
Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
Direktur



Capt. DEDY KURNIADI, M.M.
NIP. 19760508 200812 1 001

"Jujur, Amanah, Ramah & Anti Korupsi"



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Dijelaskan dalam Rincian)

Kode Akun	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	[%]	REALISASI
		2022	2022		2021
	PENDAPATAN DAERAH	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Lain-lain PAD Yang Set - LRA	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Pendapatan Hasil Kegiatan BKU	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Pendapatan BUK Lainnya	-	-	-	-
	Pendapatan PHSE Lainnya	-	-	-	-
	SELANJUTNYA DAERAH	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	SELANJUTNYA OPERAS	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Pegawai	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Bahan dan Transportasi	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Lain-lain	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Koperasi	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Pengembalian Denda & Pegawai	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Barang dan Jasa BUK	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Pengembalian Denda Barang dan Jasa BUK	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	SELANJUTNYA MODAL	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Tanah	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Perumahan dan Gedung	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Perbaikan dan Pemeliharaan	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung BUK	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Perbaikan Jalan, Jembatan dan Bangunan	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BUK	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BUK	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	SURPLUS (DEFISI)	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	REMBAYAN DAERAH	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	REMBAYAN PEREMBAHAN	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	Salah satu Perkiraan Anggaran Tahun Selanjutnya	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888
	SISA LERES-REMBAYAN ANGGARAN (SELISIR)	28.888.888.888	28.888.888.888	100,00	28.888.888.888

Acara Baku, 27 Maret 2022
POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTOR
DIREKTOR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NIP. 010000000000000000